

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Affan Ghafar , 2014 ,*Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi* ,Jakarta, Pustaka Pelajar
- A. M. Fatwa, 2009, *Potret Konstitusi Pasca - Amandemen UUD 1945* , Jakarta: Kompas,
- Charles Simabura,2011, *Parlemen Indonesia Lintas Sejarah dan Sistemnya* , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Dahlan Thaib,2001, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,
- Dahlan Thaib, 2002, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Dahlan thaib, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda, 1999, *Teori Hukum dan Konstitusi*, Jakarta: Pt. rajaGrafindo Persada,
- Gde Patja Astawa dan Suprin Na'a, 2009, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Bandung: Refika Aditama,
- Hotma P Sibuea, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Erlangga,
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI,
- Jimly Assiddiqie, 2007, *Konstitusi dan Ketatanegaraan*, Jakarta, The Biografy Institute,
- Lubis M. Solly,2003 *Kedudukan dan Perananan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR kerjasama dengan UNDP (United Nations Development Programme),
- Moh. Mahfud MD,2003, *Demokrasi dan konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan* , Jakarta: Penerbit Rineka Cipta
- Miriam Budiarjo, 1989, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia,
- Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta,Pustaka Pelajar.
- Philippus M. Hadjon, 1992, *Lembaga Tertinggi dan Lembaga - Lembaga Tinggi Negara Menurut Undang - Undang Dasar 1945 Suatu Analisa Hukum dan Kenegaraan* , Surabaya, PT Bina Ilmu
- Reni Dwi Purnomowati,2005, *Implementasi Sistem Bikameral Dalam Parlemen Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,
- Septi Nur Wijayanti & Iwan Satriawan, 2009, *Hukum Tata Negara*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
- Soehino , 2005, *Ilmu Negara*. Yogyakarta, Liberty,

Sri Soematri, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*. Liberty, Yogyakarta. 2008

Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group,

Wahyudi K, Ambar W, 2010, *Reformasi aparatur negara ditinjau kembali*, Yogyakarta, Gava Media.

Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Y.W. Sunindhia, 1987, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta, Bina Aksara.

JURNAL:

Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Memahami Undang-Undang*. Jurnal Legislasi, volume 1 No. 2, September 2004

A Ghau Kadir, *Bikameral Dalam Lembaga Perwakilan Rakyat*, Jurnal Politik Vol.3.No.1, Juli 2008

Andi Gau Kadir, *Transparansi Legislatif dalam Lembaga Perwakilan*, Jurnal Ilmu Politik Volume.1.NO.1, Juli 2018, September 2018

Hantoro. Novianto M., *Struktur Kelembagaan Negara Pasca-Perubahan UUD 1945*, Jurnal Kajian vol. 11. No. 4, Desember 2006.

Huda, Ni'matul., *Recall Anggota DPR dan DPRD Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum Volume 23, Nomor 3 2011

Ibrahim, Harmailiy, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jurnal Majelis. 2009. Volume. 1 No.1 September 2018

Meidi Kosandi., *Kontestasi politik dan perimbangan kekuasaan dalam perumusan dan implementasi UU MD3 2014*, Jurnal Politik Volume.1.NO. 1, Agustus 2015 September 2018

Novianto M Hantoro , *Kajian Yuridis Pembentukan Undang – Undang Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, Jurnal Hukum Vol 3, NO 2, Desember 2012

Ratnia Solihah, Siti Witianti , *Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014 : Permasalahan dan Upaya Mengatasinya* , Jurnal Hukum Vol.2 No. 2, Oktober 2016

Zaki Ulya. *Kontradiksi Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Ditinjau Dari Segi Kemandirian Lembaga Dalam Sistem Bikameral*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 11, Nomor 2, Juli Desember 2016

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen I, II, III, IV

Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

INTERNET :

Slamet Agus. 2014. PDIP dan PKB Tolak Pengesahan UU MD3. <http://www.antaraneews.com/berita/444181/pdip-dan-pkb-tolakpengesahan-uu-md3>. diakses 20 Juli 2018

Sonny Pungus. 2011. Teori Kewenangan. <http://sonny-tobelo.blogspot.com/2011>. diakses tanggal 11 Juli 2018

UU MD3 Harusnya Dipecah Agar Setiap Lembaga Negara Diatur UU Tersendiri <http://www.jpnn.com/read/2012/09/05/138789/UU-MD3-HarusnyaDipecah-> diakses tanggal 20 Maret 2018